

**PERAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN (UU KUP) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN
PAJAK.**

SKRIPSI

Oleh

**Mursal Harahap
2230058029**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PERAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN (UU KUP) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN
PAJAK.**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**Mursal Harahap
2230058029**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila."

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga - lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursal Harahap
NIM : 2230058029
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Peran Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dalam bentuk hasil putusan, buku-buku jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau Terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini di anggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Mursal Harahap
2230058029



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**“PERAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI
PENGADILAN PAJAK”**

Oleh :

Nama : Mursal Harahap
NIM : 2340058029
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Tatausaha Negara
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 3 Februari 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H
NUPTK. 5434757658137093

Ketua Program Studi,

Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
NUPTK. 5759741642230062

Dosen Pembimbing II,

Asst. Prof. Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H
NUPTK. 6660744645130072

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H
NUPTK. 5434757658137093



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal Tiga Februari Dua Ribu Dua Puluh Enam telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mursal Harahap
NIM : 2340058029
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Perang Undan-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak”** Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1 Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi., S.H., M.H.	Ketua	
2 Asst. Prof. Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H	Anggota	
3 Asst. Prof. Edward M.L. Panjaitan, S.H., LLM	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursal Harahap
NIM : 2230058029
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Peran Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak.

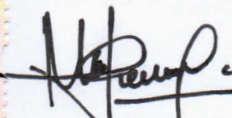
Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 3 Februari 2026




Mursal Harahap
2230058029

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peran Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak"** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disajikan sebagai salah satu syarat penting dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 (satu) yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya untuk membantu dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Asst. Prof. Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 (dua) yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya untuk membantu dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama masa perkuliahan.

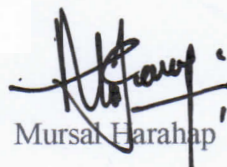
8. Yang teristimewa istri penulis yaitu Nurul Aini, S.E dan Anak-anaku tercinta, dr. Shafira Putri Nursalini Harahap, M. Najmi Murindo Harahap, S.T., dan M. Farabi Mirza Harahap, yang senantiasa memberikan semangat juang untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Teman-teman seangkatan FH K-23 bersama-sama saling mendukung mengikuti perkuliahan dengan penuh motivasi untuk mendapatkan ilmu hukum yang berguna baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sebagai bagian dari masyarakat.

Penyusunan skripsi ini diselesaikan dengan tekad dan semangat yang tinggi sebagai wujud dari pengetahuan yang diterima selama masa perkuliahan berlangsung dan pengalaman bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dan di Pengadilan Pajak. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini memiliki keterbatasan namun berupaya untuk menyelesaikan penelitian yang diharapkan memberikan manfaat dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kontribusi positif bagi semua pemangku kepentingan dalam bidang perpajakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak dan peran ketentuan hukum antar undang-undang.

Jakarta, 3 Februari 2026

Penulis



Mursah Harahap

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI DAN MISI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Ruanglingkup Penelitian.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Pengertian dan Konsep Dasar Pajak	26
B. Teori-Teori Tentang Pajak.....	28
C. Konsep Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)	29
D. Konsep dan Teori Sengketa Pajak.....	31
E. Pengadilan Pajak di Indonesia	33

F. Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai Badan Peradilan Khusus	34
G. Peran UU KUP dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia	36
H. Teori Hierarki Norma (<i>Stufenbau des Recht</i>) Menurut Hans Kelsen.....	37
I. Teori Keadilan Prosedural (<i>Procedural Justice</i>) John Rawls	42
J. Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman	45
K. Teori Keadilan Menurut Pancasila	48
L. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	51
M. Diskresi Administrasi dan Batasan Kewenangan Hakim Pajak.	52
N. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Perpajakan	53
O. Penelitian Terdahulu.....	55
BAB III.....	58
Analisis Peran UU KUP Pasal 26A Ayat (4) dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak	58
A. Kedudukan UU KUP Pasal 26A Ayat (4) dalam Struktur Norma.....	58
B. Karakter Pasal 26A Ayat (4) UU KUP sebagai Pembatasan Alat Bukti suatu analisis Fairness berdasarkan Teori Keadilan	62
C. Pasal 26A Ayat (4) dan Praktik Persidangan Dalam Perspektif Sistem Hukum	66
D. Analisis Empiris Efektivitas Pasal 26A Ayat (4) UU KUP	71
E. Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Terkait Penerapan Pasal 26A Ayat (4) UU KUP dan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak	76
BAB IV	85
Analisis Hubungan Pasal 26A Ayat (4) UU KUP, Pasal 107 UU PTUN, dan Pasal 76 UU PP	85
A. Konstruksi Hukum Perpajakan sebagai Hukum Administrasi	85
B. Titik Temu antara Pembatasan Pemeriksaan Bukti Pasal 26A ayat 4 UU KUP dan Pembatasan Pemeriksaan Sengketa TUN (107 PTUN)	89
C. Hubungan Fungsional dengan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak: Lingkup	

1. Pemeriksaan Hakim	93
D. Analisis Sistem Hukum Friedman atas Tiga Norma Pasal 26A(4) KUP, Pasal 107 PTUN dan Pasal 76 UU PP	96
E. Fakta Empiris Penguatan Keterkaitan Tiga Pasal: Pasal 26A(4) KUP, Pasal 107 UU PTUN, dan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak	101
F. Fakta Empiris dan Analisis Keterkaitan Pasal 26A ayat (4) UU KUP, Pasal 76 UU PP, dan Pasal 107 UU PTUN	108
G. Implikasi Teoretis dan Praktis terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak	111
H. Penerapan Pasal 26A ayat (4) KUP, Pasal 107 PTUN, Pasal 76 UU PP, dan Keadilan Pancasila	116
BAB V	120
KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122

ABSTRAK

- A. Nama : Mursal Harahap
B. NIM : 2340058029
C. Bagian : Hukum Tata Negara
D. Judul : Peran Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak.
E. Halaman : i-xv, 126 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Sengketa Pajak, Pasal 26A ayat (4) UU KUP, Pembuktian, Keadilan Prosedural, Pengadilan Pajak.
G. Ringkasan Isi :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak serta keterkaitannya dengan Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak,. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketegangan normatif dan asimetri kekuasaan antara fiskus dan wajib pajak, di mana Pasal 26A ayat (4) UU KUP hadir sebagai instrumen pembatasan alat bukti guna menjamin keadilan procedural.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-doktrinal dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Hukum Murni Hans Kelsen, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Keadilan John Rawls, serta Teori Keadilan Pancasila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 26A ayat (4) UU KUP berperan sentral dalam membatasi fiskus agar hanya menggunakan bukti yang telah diajukan pada tahap pemeriksaan atau keberatan, sehingga mencegah praktik *ex post justification* di persidangan, Secara teoritis, norma ini menciptakan keseimbangan (*fair equality of opportunity*) dalam kondisi *imperfect procedural justice*, Secara fungsional, Pasal 26A ayat (4) UU KUP bersinergi dengan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak yang memberikan kewenangan hakim untuk menggali kebenaran materiil, serta Pasal 107 UU PTUN yang menekankan legalitas tindakan administrative. Data empiris dalam sumber mengungkapkan bahwa 90-95% sengketa pajak adalah sengketa pembuktian, dengan tingkat kemenangan wajib pajak mencapai 46,53%, sementara fiskus hanya menang sekitar 30%, Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pembatasan bukti efektif dalam melindungi hak wajib pajak dan mendorong profesionalisme fiskus dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

sinkronisasi ketiga norma tersebut membentuk sistem *check and balances* yang menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif sesuai nilai-nilai Pancasila.

- H. Daftar Acuan : Buku 51, Dokumen dan Peraturan perundang-Undangan 7, Jurnal, Internet
- I. Dosen Pembimbing I : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Asst. Prof. Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H.



ABSTRACT

- A. Name : Mursal Harahap
B. Student ID : 2340058029
C. Major : Constitutional Law
D. Title : “The Role of the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP) in Resolving Tax Disputes in the Tax Court.
E. Pages : i-xv, 126 pages + Bibliography + Appendices
F. Keywords : Tax Disputes, Article 26A paragraph (4) of the KUP Law, Evidence, Procedural Justice, Tax Court.
G. Summary :

This article examines the strategic role of Article 26A paragraph (4) of Indonesia’s Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) in the adjudication of tax disputes before the Tax Court, particularly in its normative interaction with Article 107 of the Administrative Court Law (UU PTUN) and Article 76 of the Tax Court Law. The study is motivated by persistent normative tension and structural power asymmetry between the tax authority and taxpayers, in which Article 26A paragraph (4) functions as a procedural safeguard through the limitation of admissible evidence.

Employing a normative-doctrinal legal research method with a descriptive-analytical orientation, this study applies statutory, conceptual, and case-based approaches. The analytical framework draws upon Hans Kelsen’s Pure Theory of Law, Lawrence M. Friedman’s Legal System Theory, John Rawls’ theory of justice, and the concept of Pancasila-based justice.

The findings demonstrate that Article 26A paragraph (4) of the UU KUP plays a pivotal role in preventing ex post facto justification by restricting the tax authority to evidence previously submitted during the audit and objection stages. Normatively, this provision promotes fair equality of opportunity within an imperfect procedural justice framework. Functionally, it operates in synergy with Article 76 of the Tax Court Law, which empowers judges to ascertain material truth, and Article 107 of the UU PTUN, which reinforces the principle of administrative legality. Empirical data from secondary sources indicate that approximately 90–95% of tax disputes primarily concern evidentiary matters. Taxpayers prevail in 46.53% of cases, while the tax authority succeeds in approximately 30%, suggesting that evidentiary restrictions enhance procedural fairness, protect taxpayers’ rights, and incentivize greater institutional discipline within tax administration. This study concludes that the harmonization of these norms establishes a system of checks and balances that strengthens legal certainty and advances substantive justice in alignment with Pancasila values.

- H. References : Books 51, Document and Laws and Regulations 7, Journal and Internet

- I. *Thesis Adviser I* : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Thesis Advisor II : Asst. Prof. Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H.

